



Rencana Kerja

Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

RENJA ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Dinas DP3AKB dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan partisipatif dan terintegrasi, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Harapannya, RENJA ini dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Semoga RENJA ini dapat memberikan arah yang jelas dalam pencapaian target-target pembangunan bidang perempuan, anak, dan keluarga berencana secara berkelanjutan.

Medan,

2025



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DWIENDAH PURWANTI, S.S., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197301231998032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	43
2.4 Review terhadap RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
BAB III	68
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	68
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	73
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	73
BAB IV	78
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.....	78
BAB V	94
PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	9
Tabel 2. 2. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
Tabel 2. 3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, dan Solusi	15
Tabel 2. 4. T- C.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	19
Tabel 2. 5. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	35
Tabel 2. 6. T.C-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AKB	36
Tabel 2. 7. T-C.31 Review terhadap RKPD Tahun 2026.	47
Tabel 2. 8. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
Tabel 3. 1. Dukungan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terhadap Misi dan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah	71
Tabel 3. 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara	74
Tabel 4. 1. T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Asta Cita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup; Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu arahan pembangunan nasional memiliki tantangan pada perwujudan pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dimana salah satunya dilaksanakan melalui strategi meningkatkan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial dengan sasaran peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang salah satunya adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pembangunan Daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga. Renja ini merupakan agenda pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029. Renstra merupakan arah pembangunan ingin dicapai oleh Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun rencana pembangunan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selain daripada itu, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan adanya penyeragaman program kegiatan dan sub kegiatan dalam setiap urusan pembangunan, termasuk pada urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, turut menjadi dasar dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh SDM dan Lembaga Masyarakat yang bergerak dengan fokus peningkatan peran perempuan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara bersifat umum dan teknis. Dasar hukum penyusunan Renja Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 Tentang Hak-hak Politik Perempuan
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
19. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
20. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

23. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
24. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional;
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
34. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak.
35. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
36. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

37. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
38. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
39. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
40. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
41. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
42. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
43. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
47. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
51. Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.
 52. Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;
 53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 54. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah;
 55. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12);
 56. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
 57. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20;
 58. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 59. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 60. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 61. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

62. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 54);
63. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
64. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
65. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
66. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
67. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/357/KPTS/2023 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai arah pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2026;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara tahun 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) tahun 2026;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) tahun 2026 yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang

bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;

3. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 10 (sepuluh) Program, 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka disusun perjanjian kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1.	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi	%	28%
2.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	11,4
			Rasio kekerasan terhadap anak	per 10.000 penduduk usia anak	2,8
3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	%	86%
4.	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	point	2,42

Perjanjian Kinerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 2. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	28%	54,7%	195,3 %	Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AKB Provsu
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11,4	11,21	98%	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Provsu
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,8	2,66	95%	
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	86%	80%	93%	Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AKB Provsu
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,42	2,36	102,5 %	Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas P3AKB Provsu

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Sasaran Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2024 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 10

Perangkat Daerah atau sebesar 28% dari total jumlah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara potensial sebanyak 23 unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender. Target ini tidak mengalami perubahan meskipun adanya *refocusing* anggaran, karena adanya komitmen yang kuat dari setiap Perangkat Daerah untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Adapun ke 23 Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen responsif gender tersebut adalah :

1. Biro Hukum Setdaprovsu
2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu
5. Biro Perekonomian Setdaprovsu
6. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
7. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu
8. Biro Organisasi Setdaprovsu
9. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
12. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
14. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
18. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
19. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
20. RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
21. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara
22. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
23. RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Capaian sebanyak 23 Perangkat Daerah dari target sebanyak 10 OPD yang mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender, mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Sumatera Utara sudah cukup baik.

Sasaran Meningkatnya Layanan dan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mengalami Kekerasan.

Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2024, target pencapaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan dewasa sebanyak 11,4. Berdasarkan data laporan kekerasan yang tersaji pada aplikasi kekerasan, pada tahun 2024 terdapat 623 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk perempuan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 5.556.410. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan adalah sebanyak 11,21 perempuan mengalami kekerasan di Provinsi Sumatera Utara (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Sedangkan untuk rasio kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 2,8 dari setiap 10.000 penduduk usia anak. Berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi laporan kekerasan, pada tahun 2024 terdapat 1.199 anak yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk usia anak di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.499.909. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap anak dari setiap 10.000 penduduk usia anak, sebanyak 2,66 orang anak mengalami kekerasan (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Capaian dari rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024, memperlihatkan perlunya intervensi yang lebih kuat kepada upaya pencegahan dan penurunan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara dengan optimalisasi koordinasi dan regulasi yang akan mendukung percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Sasaran Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mana pada tahun 2024 memiliki target sebanyak 26 perangkat daerah berkontribusi atau sebesar 86% dari Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA (30 OPD), dengan realisasi target kinerja sebanyak 24 perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara atau sebesar 80% dari total keseluruhan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip
4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Dinas Sosial
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Perikanan dan Kelautan
11. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
12. UPTD Khusus RSU Haji Medan
13. Dinas Perhubungan
14. UPTD Khusus Rumah sakit jiwa Prof.Dr.M. Ildrem
15. Dinas Pendidikan
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
18. Biro Umum Setdaprovsu
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
20. Badan Pendapatan Daerah
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan
22. TP PKK

Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai pengampu kegiatan implementasi KLA di Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak.

Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Angka Kelahiran Total menggambarkan ukuran keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. Indikator TFR dibutuhkan untuk dapat membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil

dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Selain itu, TFR juga dapat digunakan sebagai salah satu parameter proyeksi jumlah penduduk.

Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan tingkat urbanisasi. Faktor Ekonomi misalnya tingkat pendapatan dapat mempengaruhi fertilitas. Ketika pendapatan seseorang meningkat akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fertilitas adalah tingkat kesehatan yang dapat diwakili dengan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15-49 yang berstatus kawin. Keduanya berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas.

Berdasarkan PK23 ADJ SUSENAS 2024, TFR Sumatera Utara sebesar 2,36 mengalami penurunan 0,03 poin dari tahun 2023 yaitu 2,39 (Long Form SP 2020). Namun, angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Nasional sebesar 2,18 (PK23 ADJ SUSENAS 2023).

Tabel 2. 3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	28%	54,7%	195,3%	Adanya komitmen yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan dalam merealisasi indikator melalui optimalisasi tugas dan fungsi dari SDM yang terlibat aktif dalam integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan responsif gender dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi setiap lapisan masyarakat di Sumatera Utara
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11,4	11,21	98%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan	Penguatan kebijakan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO Peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pemberian layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,8	2,66	95%		

3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	86%	80%	93%	1. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah KLA yang akan menjadi peta jalan perwujudan Provinsi Layak Anak di Sumatera Utara. 2. Kurang maksimalnya tugas, fungsi dan peran Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara	1. Menyusun RAD KLA Provinsi Sumatera Utara sebagai pedoman/peta jalan perwujudan Kab./Kota Layak Anak di Sumatera Utara menuju Provinsi Sumatera Utara Layak Anak (PROVILA) 2. Melakukan revitalisasi dan penguatan terhadap anggota Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,42	2,36	102,5%	Meningkatnya capaian Persentase WUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Hal ini disebabkan karena ketersediaan alkon yang sudah terdistribusi ke seluruh faskes yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta adanya sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas antara Pusat, Provinsi dan Daerah	

Bila melihat tabel di atas, dapat dikatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja dari kedua urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara.

Capaian dari indikator Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, mencapai lebih dari 100 % dari target. Hal ini salah satunya dikarenakan target yang diturunkan menjadi 24% karena kriteria perangkat daerah yang melaksanakan PPRG pada tahun ini tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi sampai pelaksanaan kegiatan yang responsif gender melalui Laporan Pelaksanaan PUG, sehingga pada tahun ini target diturunkan menjadi 24% dengan realisasi mencapai 54,7%. Secara umum capaian ini juga didukung oleh tingginya komitmen dari para pengambil kebijakan di lingkungan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Namun demikian upaya peningkatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan responsif gender dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi setiap lapisan masyarakat di Sumatera Utara.

Beberapa indikator yang tidak tercapai hingga akhir kinerja Renstra (Tahun 2024) seperti Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak membutuhkan Penguatan kebijakan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh stakeholder potensial. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, dan indikator Angka Kelahiran Total, memiliki kendala pada minimnya anggaran intervensi dan beberapa kendala teknis lainnya seperti belum optimalnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan dan belum meluasnya jejaring mitra intervensi program dan kegiatan di 33 kabupaten/kota. Dengan kondisi ini maka Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara akan berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan beberapa strategi seperti upaya peningkatan koordinasi dalam penyesuaian anggaran intervensi yang meliputi 33 kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM teknis serta perluasan jejaring kerjasama mitra yang melibatkan lembaga/organisasi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik budaya dan segmentasi sasaran.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebesar 94,97%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yang ditetapkan dan dijabarkan dalam indikator kinerja utama, semua telah mencapai kinerja yang diharapkan. Sebagai wujud hasil

pencapaian pelaksanaan Renja terhadap target capaian Renstra dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut.

Tabel 2. 4. T- C.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja program (<i>outcome</i>) Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renaj PD tahun 2024)	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		98.859.069.919	16.851.736.277	17.782.096.736	16.851.736.277	94,97%	17.782.096.736	16.851.736.277	94,97%
2.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp85.149.979.389	16.357.367.762	Rp17.146.487.036	16.357.367.762	85%	Rp17.146.487.036	16.357.367.762	85%
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dukungan kinerja tersedia	Rp75.708.321.884	Rp15.741.786.524	Rp16.457.452.780	Rp15.741.786.524	96%	Rp16.457.452.780	Rp15.741.786.524	96%
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan tersedia	371.686.400	Rp85.465.500	Rp85.466.150	Rp85.465.500	99,7%	Rp85.466.150	Rp85.465.500	99,7%
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	371.686.400	85.465.500	85.466.150	85.465.500	11	85.466.150	85.465.500	11
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan administrasi keuangan tersedia	51.913.868.400	Rp12.410.797.304	Rp13.001.290.429	Rp12.410.797.304	100,0%	Rp13.001.290.429	Rp12.410.797.304	100,0%

2.08.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	50.919.116.400	12.209.957.304	Rp12.798.280.429	12.209.957.304	13	Rp12.798.280.429	12.209.957.304	13
2.08.01.1.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	994.752.000	200.840.000	Rp203.010.000	200.840.000	12	Rp203.010.000	200.840.000	12
2.08.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dukungan peningkatan kapasitas SDM tersedia	1.210.275.000	Rp142.570.000	Rp144.400.000	Rp142.570.000	99,6%	Rp144.400.000	Rp142.570.000	99,6%
2.08.01.1.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	746.130.000	86.250.000	Rp86.250.000	86.250.000	1	Rp86.250.000	86.250.000	1
2.08.01.1.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	464.145.000	56.320.000	Rp58.150.000	56.320.000	68	Rp58.150.000	56.320.000	68
2.08.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan administrasi umum tersedia	11.282.354.183	Rp927.061.602	Rp948.879.143	Rp927.061.602	99,9%	Rp948.879.143	Rp927.061.602	99,9%
2.08.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72.953.943	13.756.450	Rp13.757.522	13.756.450	1	Rp13.757.522	13.756.450	1
2.08.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	893.189.746	97.900.000	Rp105.591.503	97.900.000	8	Rp105.591.503	97.900.000	8
2.08.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.053.851.523	171.466.200	Rp173.730.168	171.466.200	4	Rp173.730.168	171.466.200	4
2.08.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	105.676.032	30.290.000	Rp39.348.900	30.290.000	4	Rp39.348.900	30.290.000	4
2.08.01.1.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22.000.000	4.745.000	Rp4.747.000	4.745.000	960	Rp4.747.000	4.745.000	960

2.08.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.134.682.939	608.903.952	Rp611.704.050	608.903.952	300	Rp611.704.050	608.903.952	300
2.08.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan penunjang urusam pemerintahan tersedia	7.188.101.845	Rp1.808.477.705	Rp1.880.071.692	Rp1.808.477.705	100,0%	Rp1.880.071.692	Rp1.808.477.705	100,0%
2.08.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.600.000	2.513.000	2.529.500	2.513.000	4	2.529.500	2.513.000	4
2.08.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.387.264.000	439.047.926	Rp454.400.000	439.047.926	12	Rp454.400.000	439.047.926	12
2.08.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.761.237.845	1.366.916.779	Rp1.425.671.692	1.366.916.779	12	Rp1.425.671.692	1.366.916.779	12
2.08.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan pemeliharaan BMD	3.742.036.056	Rp367.414.413	Rp397.345.366	Rp367.414.413	74,3%	Rp397.345.366	Rp367.414.413	74,3%
2.08.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.644.361.664	219.996.413	Rp248.461.366	219.996.413	12	Rp248.461.366	219.996.413	12
2.08.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.638.490.392	126.278.000	Rp126.944.000	126.278.000	1	Rp126.944.000	126.278.000	1

2.08.01.1.0 9.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	459.184.000	21.140.000	Rp21.940.000	21.140.000	4	Rp21.940.000	21.140.000	4
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	3.498.590.426	147.069.000	174.494.000	147.069.000	100%	174.494.000	147.069.000	100%
2.08.02.1.0 1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	persentase Perangkat Daerah Responsive Gender	750.763.319	94.138.000	116.613.000	94.138.000	35%	116.613.000	94.138.000	35%
2.08.02.1.0 1.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	405.890.278	63.818.000	Rp84.635.000	63.818.000	2	Rp84.635.000	63.818.000	2
2.08.02.1.0 1.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	344.873.041	30.320.000	Rp31.978.000	30.320.000	42	Rp31.978.000	30.320.000	42
2.08.02.1.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	968.785.625	39.431.000,00	Rp44.381.000	39.431.000,00	35%	Rp44.381.000	39.431.000,00	35%

2.08.02.1.0 2.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	968.785.625	39.431.000	Rp44.381.000	39.431.000	25	Rp44.381.000	39.431.000	25
2.08.02.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	1.779.041.482	Rp13.500.000	Rp13.500.000	Rp13.500.000	30%	Rp13.500.000	Rp13.500.000	30%
2.08.02.1.0 3.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	1.779.041.482	13.500.000	Rp13.500.000	13.500.000	20	Rp13.500.000	13.500.000	20
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk Perempuan)	1.545.412.779	Rp181.906.250	Rp191.867.000	Rp181.906.250	100%	Rp191.867.000	Rp181.906.250	100%
2.08.03.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah/ lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	170.681.342	Rp50.093.000	Rp50.847.500	Rp50.093.000	0	Rp50.847.500	Rp50.093.000	0

2.08.03.1.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	170.681.342	50.093.000	Rp50.847.500	50.093.000	2	Rp50.847.500	50.093.000	2
2.08.03.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	1.374.731.437	Rp131.813.250	Rp141.019.500	Rp131.813.250	35%	Rp141.019.500	Rp131.813.250	35%
2.08.03.1.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	207.977.557	28.062.000	Rp34.508.750	28.062.000	20	Rp34.508.750	28.062.000	20
2.08.03.1.0 3.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	658.914.972	103.751.250	Rp106.510.750	103.751.250	250	Rp106.510.750	103.751.250	250
2.08.03.1.0 3.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	507.838.908	-	-	-	-	-	-	-
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN	Indeks Kualitas Keluarga	353.897.910	Rp57.682.550	Rp84.952.506	Rp57.682.550	100%	Rp84.952.506	Rp57.682.550	100%

	KUALITAS KELUARGA									
2.08.04.1.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan penguatan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	353.897.910	Rp57.682.550	Rp84.952.506	Rp57.682.550	100%	Rp84.952.506	Rp57.682.550	100%
2.08.04.1.0 1.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	353.897.910	57.682.550	Rp84.952.506	57.682.550	1	Rp84.952.506	57.682.550	1
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak	437.473.763	Rp0	Rp0	Rp0	0	Rp0	Rp0	0
2.08.05.1.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak yang valid	437.473.763	Rp0	Rp0	Rp0	0	Rp0	Rp0	0
2.08.05.1.0 1.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	179.019.033	-	-	-	-	-	-	-
2.08.05.1.0 1.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	258.454.730	-	-	-	-	-	-	-
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1.915.867.621	Rp150.199.438	Rp152.557.000	Rp150.199.438	100%	Rp152.557.000	Rp150.199.438	100%

2.08.06.1.0 1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pelembagaan PHA	641.016.540	Rp1.792.000	Rp1.792.000	Rp1.792.000	100%	Rp1.792.000	Rp1.792.000	100%
2.08.06.1.0 1.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	641.016.540	1.792.000	Rp1.792.000	1.792.000	24	Rp1.792.000	1.792.000	24
2.08.06.1.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan	1.274.851.081	Rp148.407.438	Rp150.765.000	Rp148.407.438	100%	Rp150.765.000	Rp148.407.438	100%
2.08.06.1.0 2.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	835.000.000	139.490.000	Rp140.629.000	139.490.000	430	Rp140.629.000	139.490.000	430
2.08.06.1.0 2.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	439.851.081	8.917.438	Rp10.136.000	8.917.438	1	Rp10.136.000	8.917.438	1
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 100.000 penduduk Anak)	1.690.415.006	Rp78.724.000	Rp85.163.750	Rp78.724.000	100%	Rp85.163.750	Rp78.724.000	100%

2.08.07.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap Anak	660.574.713	Rp50.655.000	Rp50.655.000	Rp50.655.000	35%	Rp50.655.000	Rp50.655.000	35%
2.08.07.1.0 1.0003	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	455.840.875	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.1.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	204.733.838	50.655.000	Rp50.655.000	50.655.000	2	Rp50.655.000	50.655.000	2
2.08.07.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK yang ditingkatkan kapasitasnya	1.029.840.293	Rp28.069.000	Rp34.508.750	Rp28.069.000	40%	Rp34.508.750	Rp28.069.000	40%
2.08.07.1.0 3.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	354.099.454	-	-	-	-	-	-	-

2.08.07.1.0 3.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	190.088.037	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.1.0 3.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	485.652.802	28.069.000	Rp34.508.750	28.069.000	20	Rp34.508.750	28.069.000	20
2.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Rp3.567.006.383	Rp173.820.700	Rp635.609.700	Rp173.820.700		Rp635.609.700	Rp173.820.700	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	2.007.444.383	Rp115.305.700	Rp115.755.700	Rp115.305.700	100%	Rp115.755.700	Rp115.305.700	100%
2.14.02.1.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Indeks Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk	1.526.312.961	Rp86.411.000	Rp86.861.000	Rp86.411.000	60%	Rp86.861.000	Rp86.411.000	60%
2.14.02.1.0 1.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	491.774.968	20.310.000	Rp20.760.000	20.310.000	3	Rp20.760.000	20.310.000	3

2.14.02.1.0 1.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	498.825.875	11.000.000	Rp11.000.000	11.000.000	1	Rp11.000.000	11.000.000	1
2.14.02.1.0 1.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	535.712.118	55.101.000	Rp55.101.000	55.101.000	3	Rp55.101.000	55.101.000	3
2.14.02.1.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	481.131.422	Rp28.894.700	Rp28.894.700	Rp28.894.700	40%	Rp28.894.700	Rp28.894.700	40%
2.14.02.1.0 2.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	481.131.422	28.894.700	Rp28.894.700	28.894.700	2	Rp28.894.700	28.894.700	2
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi Kontrasepsi modern (mCPR)	1.178.448.000	Rp35.415.000	Rp392.816.000	Rp35.415.000	100%	Rp392.816.000	Rp35.415.000	100%
2.14.03.1.0 1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah stakeholder dan mitra yang berperan aktif dalam Program Bangsa Kencana	856.623.000	Rp35.415.000	Rp285.541.000	Rp35.415.000	100%	Rp285.541.000	Rp35.415.000	100%

	Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
2.14.03.1.0 1.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	120.390.000	-	-	-	3	-	-	3
2.14.03.1.0 1.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	89.583.000	-	Rp0	-	2	Rp0	-	2
2.14.03.1.0 1.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	284.772.000	-	-	-	2	-	-	2
2.14.03.1.0 1.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	361.878.000	35.415.000	Rp35.415.000	35.415.000	4	Rp35.415.000	35.415.000	4

2.14.03.1.0 2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina dan berperan aktif dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	321.825.000	0	107.275.000	0	0	107.275.000	0	0
2.14.03.1.0 2.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	321.825.000	-	Rp0	-	2	Rp0	-	2
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran pada Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	381.114.000	Rp23.100.000	Rp127.038.000	Rp23.100.000	100%	Rp127.038.000	Rp23.100.000	100%
2.14.04.1.0 1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi dan kelompok keluarga yang memperoleh pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	247.050.000	Rp0	Rp82.350.000	Rp0	0	Rp82.350.000	Rp0	0
2.14.04.1.0 1.0020	Fasilitasi Pengembangan kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-R) di kampung KB	Jumlah PIK-R yang mengikuti Pengembangan Kelompok PIK -R di Kampung KB	0	-	-	-	8	-	-	8
2.14.04.1.0 1.0015	Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	119.010.000	-	Rp0	-	3	Rp0	-	3

2.14.04.1.0 1.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang dibina	128.040.000	-	Rp0	-	4	Rp0	-	4
	Advokasi, sosialisasi dan promosi indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tingkat Provinsi dan kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil advokasi, sosialisasi dan promosi iBangga	0	-	-	-	3	-	-	3
2.14.04.1.0 2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga	134.064.000	Rp23.100.000	Rp44.688.000	Rp23.100.000	100%	Rp44.688.000	Rp23.100.000	100%
2.14.04.1.0 2.0001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	45.243.000	13.431.000	Rp13.731.000	13.431.000	3	Rp13.731.000	13.431.000	3
2.14.04.1.0 2.0007	Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	88.821.000	9.669.000	Rp9.869.000	9.669.000	2	Rp9.869.000	9.669.000	2
2.08.03	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			Rp320.547.815		Rp320.547.815			Rp320.547.815	

2.08.03.1.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan	1.877.328.915	Rp250.466.665	Rp325.814.520	Rp250.466.665	30%	Rp325.814.520	Rp250.466.665	30%
2.08.03.1.0 2.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Rp1.396.688.762	178.577.665	Rp208.074.520	178.577.665	360	Rp208.074.520	178.577.665	360
2.08.03.1.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp480.640.153	71.889.000	Rp117.740.000	71.889.000	70	Rp117.740.000	71.889.000	70
2.08.07.1.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase AMPK yang menda-patkan pelayanan kewenangan Provinsi	400.362.546	Rp70.081.150	Rp117.740.000	Rp70.081.150	25%	Rp117.740.000	Rp70.081.150	25%
2.08.07.1.0 2.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	400.362.546	70.081.150	Rp117.740.000	70.081.150	200	Rp117.740.000	70.081.150	200

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara maka dituangkanlah kinerja tersebut ke dalam beberapa Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG;
2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
3. Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten / Kota Layak Anak;
4. TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total);

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 memperlihatkan adanya kenaikan target kinerja walaupun tidak keseluruhan target yang disebabkan adanya penyesuaian kebijakan dan anggaran sebagai respon atas kondisi yang terjadi di Sumatera Utara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 5. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	28%	54,7%	195,3%	174.494.000	147.069.000	84,28%	354.899.000
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11,4	11,21	98%	517.681.520	453.574.741	87,62%	139.421.800
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,8	2,66	95%	202.903.750	148.805.150	73,34%	44.626.300
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	86%	80%	93%	152.557.000	150.199.438	98,45%	371.711.000
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,42	2,36	102,5%	115.755.700	115.305.700	99,61%	250.011.000

Hasil analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga dapat dilihat dari Tabel T.C-30 berikut.

Tabel 2. 6. T.C-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AKB

No	Program / kegiatan / Sub kegiatan / rincian	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi
			Tahun 2024	Tahun 2025	tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	tahun 2026
1	2	3	6	7	9	10	11	13
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					85%	-	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dukungan kinerja tersedia				96%	-	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan tersedia				100%	-	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	8 dokumen	11 dokumen	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan administrasi keuangan tersedia				100%	-	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	13 kali	13 kali	14 bulan	13 kali	-	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	-	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dukungan peningkatan kapasitas SDM tersedia				100%	-	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	7 orang	5 orang	1 orang	-	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 pcs			68 pcs	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan administrasi umum tersedia				99,9%	-	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	-	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	5 paket	8 paket	-	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	-	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	-	

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	900 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	960 dokumen	-	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	35 laporan	35 laporan	300 laporan	-	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan penunjang urusam pemerintahan tersedia				100%	-	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	2 laporan	4 laporan	-	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	-	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	13 laporan	12 laporan	-	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan pemeliharaan BMD				74,3%	-	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 kali	32 unit	32 unit	12 kali	-	
16	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 paket	1 paket	1 paket	1 unit	-	
17	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 paket	3 paket	3 paket	4 unit	-	
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				100%	-	
7	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	persentase Perangkat Daerah Responsive Gender				35%	-	
18	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2 dokumen	2 dokumen	-	2 kebijakan	-	
19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	47 OPD	47 OPD	-	42 OPD	-	
8	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi				35%	-	

20	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	45 organisasi	60 organisasi	-	25 lembaga	-	
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya				30%	-	
21	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	20 orang	60 orang	60 orang	20 orang	-	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk Perempuan)				100,00%	-	
10	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah/ lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan				35,00%	-	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	3 dokumen	5 dokumen	-	2 dokumen	-	
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya				35%	-	
23	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 orang	30 orang	30 orang	20 orang	-	
24	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	550 orang	650 orang	-	250 orang	-	
25	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	4 dokumen	-	-	-	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga				100%	-	

12	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan penguatan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak				100%	-	
26	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	5 dokumen	2 dokumen	-	1 dokumen	-	
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak				0	-	
13	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak yang valid				0	-	
27	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	3 dokumen	-	-	-	-	
28	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	3 dokumen	-	-	-	-	
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				100%	-	
14	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pelembagaan PHA				100%	-	
29	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	35 organisasi	55 organisasi	-	24 perangkat daerah	-	
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan				100%	-	
30	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	550 orang	650 orang	-	430 orang	-	
31	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 kegiatan	-	
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 100.000 penduduk Anak)				100%	-	

16	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap Anak				35%	-	
32	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	25 organisasi	35 organisasi	-	-	-	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	2 dokumen	4 dokumen	-	2 dokumen	-	
17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK yang ditingkatkan kapasitasnya				40%	-	
34	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi				-	-	
35	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	2 dokumen	3 dokumen	-	-	-	
36	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	125 orang	150 orang	-	20 orang	-	
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						-	
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				100%	-	
18	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Indeks Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk				60%	-	
37	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	5 laporan	6 laporan	-	3 laporan	-	

38	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	2 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	
39	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	2 daerah	3 daerah	3 daerah	3 daerah	-	
19	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk				40%	-	
40	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	-	
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi Kontrasepsi modern (mCPR)				100%	-	
20	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder dan mitra yang berperan aktif dalam Program Bangga Kencana				100%	-	
41	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	4 dokumen	4 dokumen	-	3 dokumen	-	
42	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	7 daerah			2 dokumen	-	
43	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	9 laporan			2 dokumen	-	
44	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	3 daerah	5 daerah	-	4 dokumen	-	

21	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina dan berperan aktif dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				0	-	
45	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	25 organisasi	35 organisasi	-	2 organisasi	-	
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran pada Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)				100%	-	
22	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi dan kelompok keluarga yang memperoleh pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				0	-	
46	Fasilitasi Pengembangan kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-R) di kampung KB	Jumlah PIK-R yang mengikuti Pengembangan Kelompok PIK-R di Kampung KB				-	-	
47	Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	3 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	-	
48	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang dibina	4 kelompok	5 kelompok	-	4 kelompok	-	
49	Advokasi, sosialisasi dan promosi indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tingkat Provinsi dan kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil advokasi, sosialisasi dan promosi iBangga	4 daerah	5 daerah	2 dokumen	3 laporan	-	
23	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga				100%	-	
50	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 dokumen	5 dokumen	-	3 dokumen	-	

51	Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga					-	-	
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							-	
24	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan					30%	-	
52	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	450 orang	650 orang	-		360 orang	-	
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	45 layanan	50 layanan	-		70 layanan	-	
25	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan kewenangan Provinsi					25%	-	
54	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	170 layanan	250 layanan	-		200 orang	-	

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik, namun berdasarkan hasil evaluasi

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang diharmonisasikan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian terkait, maka terdapat beberapa isu penting pembangunan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2026 yaitu :

1. Pengarusutamaan gender, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Perempuan;
2. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
3. Pertumbuhan penduduk seimbang dan keluarga berkualitas

2.4 Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan sistematika penyusunan RKPD Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. Top-down, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
- b. Bottom-up, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.

- c. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi, berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
- c. Penyusunan Rancangan RKPD
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan RKPD

Kedudukan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan RKPD tahun ke-2 selama periode RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Renstra menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD).

Sebelum ditetapkan RAPBD, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas I-3 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan prioritas plafon

anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua Rencana Kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa agenda prioritas terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang masuk dalam agenda RKPD 2026 diantaranya yaitu :

- a. Pengentasan dan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- b. Pencegahan dan Penanganan Stunting;
- c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (PUG);
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak;
- e. Optimalisasi upaya pencegahan dan penanganann kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, dan;
- f. Upaya perwujudan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.

Tabel 2. 7. T-C.31 Review terhadap RKPD Tahun 2026.

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	4	Rp6	7	3	9	10	Rp11	12
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		Rp19.560.460.273	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp23.384.234.751	
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp18.122.110.691	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				Rp21.676.650.220	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp15.318.043.871	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Rp18.592.176.718	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp3.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp4.070.000	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	Rp3.700.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Sumut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	Rp4.070.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp11.590.017.409	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp14.491.347.610	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Rp11.366.697.409	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Rp14.245.695.610	

3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp223.320.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp245.652.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp8.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp9.075.000	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp -	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sumut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Rp -	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	Rp8.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	Rp9.075.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.142.093.742	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp1.256.303.116	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	Rp15.357.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp16.893.030	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	Rp570.389.208	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp627.428.129	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	Rp142.744.344	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp157.018.778	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	Rp22.550.890	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	Rp24.805.979	

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24 dokumen	Rp6.244.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sumut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	Rp6.868.400	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	Rp384.808.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	Rp423.288.800	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp1.981.183.570	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp2.179.301.927	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp5.485.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp6.033.500	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	Rp530.530.436	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp583.583.480	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 laporan	Rp1.445.168.134	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	13 laporan	Rp1.589.684.947	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp592.799.150	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp652.079.065	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	32 unit	Rp362.489.150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Sumut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 unit	Rp398.738.065	

	atau Kendaraan Dinas Jabatan			atau Kendaraan Dinas Jabatan					
16	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	Rp199.330.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	Rp219.263.000	
17	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 paket	Rp30.980.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 paket	Rp34.078.000	
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Rp558.383.286	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Rp614.221.615	
7	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Rp72.446.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				Rp79.690.600	
18	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	20 laporan	Rp23.032.000	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Sumut	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	20 laporan	Rp25.335.200	

19	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	25 lembaga	Rp49.414.000	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	Sumut	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	25 lembaga	Rp54.355.400	
8	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		Rp35.428.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				Rp38.970.800	
20	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan asyarakat di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	75 orang	Rp35.428.000	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan asyarakat di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi		jumlah SDM asyara asyarakat, asyarakat potensial, asyarakat penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	75 orang	Rp38.970.800	
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Rp450.509.286	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				Rp495.560.215	
21	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins	60 orang	Rp450.509.286	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins	Sumut	jumlah SDM asyara penyedia layanan pemberdayaan asyarakat yang mendapatkan bimtek	60 orang	Rp495.560.215	

III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rp304.448.429	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Rp334.893.272	
10	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Rp50.845.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp55.929.500	
22	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	5 kegiatan	Rp50.845.000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Sumut	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP asyara provinsi, asyarakat, serta Kab/Kota	5 kegiatan	Rp55.929.500	
11	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Rp163.133.415	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp179.446.757	
23	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	254 orang	Rp163.133.415	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Sumut	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan	254 orang	Rp179.446.757	

	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Rp90.470.014	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				Rp99.517.015	
24	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30 orang	Rp20.472.500	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Sumut	jumlah SDM asyara penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	30 orang	Rp22.519.750	
25	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp69.997.514	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	Rp76.997.265	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rp1.042.128.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Rp1.146.340.800	

13	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Rp1.042.128.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				Rp1.146.340.800	
26	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	9 lembaga	Rp1.042.128.000	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Sumut	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	9 lembaga	Rp1.146.340.800	
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Rp34.808.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Rp38.288.800	
14	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Rp34.808.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				Rp38.288.800	
27	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	2 dokumen	Rp34.808.000	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Sumut	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 dokumen	Rp38.288.800	
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Rp433.039.400	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Rp476.343.340	

15	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Rp42.039.800	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				Rp46.243.780	
28	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 laporan	Rp42.039.800	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 laporan	Rp46.243.780	
16	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Rp390.999.600	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				Rp430.099.560	
29	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	1 kegiatan	Rp26.233.850	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Sumut	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 kegiatan	Rp28.857.235	
30	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	2 dokumen	Rp275.115.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Sumut	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	2 dokumen	Rp302.626.500	

31	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	60 orang	Rp89.650.750	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	jumlah SDM asyara penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek	60 orang	Rp98.615.825	
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rp431.259.705	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Rp474.385.675	
17	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Rp50.625.400	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp55.687.940	
32	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	20 lembaga	Rp50.625.400	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Sumut	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	20 lembaga	Rp55.687.940	
18	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Rp40.726.074	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp44.798.681	

33	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90 orang	Rp40.726.074	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90 orang	Rp44.798.681	
19	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Rp339.908.231	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp373.899.054	
34	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16 kegiatan	Rp291.363.231	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	16 kegiatan	Rp320.499.554	
35	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	30 orang	Rp48.545.000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	30 orang	Rp53.399.500	

	Khusus Kewenangan Provinsi								
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Rp880.292.461	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp1.093.721.698	
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Rp379.401.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Rp417.341.100	
20	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Rp314.401.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				Rp345.841.100	
36	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	5 dokumen	Rp123.341.000	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Sumut	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	5 dokumen	Rp135.675.100	

37	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3 dokumen	Rp135.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Sumut	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3 dokumen	Rp148.500.000	
38	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	3 dokumen	Rp56.060.000	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Sumut	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	3 dokumen	Rp61.666.000	
21	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		Rp65.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi				Rp71.500.000	
39	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	Rp65.000.000	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Sumut	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	Rp71.500.000	
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rp218.859.888	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Rp366.145.868	

22	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Rp218.859.888	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Rp366.145.868	
40	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	3 dokumen	Rp70.000.000	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Sumut	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	3 dokumen	Rp77.000.000	
41	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	2 dokumen	Rp62.859.888	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Sumut	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	2 dokumen	Rp69.145.877	
42	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	3 Dokumen	Rp86.000.000	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Sumut	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	3 Dokumen	Rp219.999.991	

						Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Rp282.031.573	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Rp310.234.730	
23	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Rp131.626.050	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp144.788.655	
43	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	2 kelompok	Rp84.999.350	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Sumut	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	2 kelompok	Rp93.499.285	
44	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Rp46.626.700	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumut	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Rp51.289.370	

24	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Rp150.405.523	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp165.446.075	
45	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	2 dokumen	Rp32.895.700	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Sumut	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	2 dokumen	Rp36.185.270	
46	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	12 organisasi	Rp54.999.950	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Sumut	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	12 organisasi	Rp60.499.945	

47	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	2 dokumen	Rp62.509.873	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Sumut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	2 dokumen	Rp68.760.860	
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		Rp558.057.121	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				Rp613.862.833	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rp445.643.353	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Rp490.207.688	
25	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Rp445.643.353	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp490.207.688	
48	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70 orang	Rp117.607.800	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70 orang	Rp129.368.580	
49	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	100 orang	Rp328.035.553	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	Sumut	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat	100 orang	Rp360.839.108	

	Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rp112.413.768	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Rp123.655.145	
26	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Rp112.413.768	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp123.655.145	
50	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 orang	Rp112.413.768	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 orang	Rp123.655.145	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumatera Utara tahun 2026 didiskusikan dalam forum diskusi (musrenbang) untuk menjaring dan mengidentifikasi kebutuhan di tengah masyarakat terkait dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang melibatkan perangkat daerah pengampu urusan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi dan kab/kota, dengan tujuan untuk menyelaraskan seluruh target kinerja urusan P3AKB yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta isu strategis yang sudah tertuang di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 8. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERMATA (Perempuan Mandiri Tangguh dan Berdaya) melalui calon pelaku usaha.	Kota Binjai		60 orang	
		PERMATA (Perempuan Mandiri Tangguh dan Berdaya) melalui calon pelaku usaha.	Kab Langkat		60 orang	
		PERMATA (Perempuan Mandiri Tangguh dan Berdaya) melalui calon pelaku usaha.	Kab. Derdang Bedagai		60 orang	
		PERMATA (Perempuan Mandiri Tangguh dan Berdaya) melalui calon pelaku usaha.	Kota Tebing Tinggi		60 orang	
		PERMATA (Perempuan Mandiri Tangguh dan Berdaya) melalui calon pelaku usaha.	Kab. Padangsidimpuan		60 orang	

1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	27 OPD	Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak
		Kegiatan : Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten Dairi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Pembinaan dan Pendampingan Kota Layak Anak Pembina
			Kabupaten Pakpak Bharat	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
			Kabupaten Toba	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Simalungun	Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan	Penguatan Pusat Informasi Sahabat Anak
			Kota Tanjungbalai	Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak		
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten Asahan	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Bimtek	120 orang	Pelatihan Konvensi Hak Anak Pengelola Puskesmas Ramah Anak Kabupaten/Kot a
			Kabupaten Batu Bara	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang		

				mendapatkan Bimtek	
			Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Bimtek	
			Kota Sibolga	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Bimtek	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, Prioritas Nasional meliputi:

- Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat (PHTC)/*quick wins*. 7 Program Prioritas tersebut meliputi:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Arah Kebijakan dari Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak. Sedangkan Arah Kebijakan dari Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK). Kedua Arah Kebijakan tersebut mendukung Asta Cita ke 4 (empat) yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut: Visi yang ingin dicapai yaitu “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

- Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
- Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
- Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh.

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 8 (delapan) tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Tujuan 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- Tujuan 3 Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
- Tujuan 4 Ekonomi yang Stabil dan Inklusif
- Tujuan 5 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas

- Tujuan 6 Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan
- Tujuan 7 Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat.
- Tujuan 8 Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya

Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendukung visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara melalui Misi Pembangunan jangka menengah provinsi Sumatera Utara ke 1 dan 5. Dukungan terhadap Misi dan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Dukungan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terhadap Misi dan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi 2024	Target 2026
1	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,5	92,01
2	Misi 5 Memperkuat Keetahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya	Menguatnya Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69,79	71,96
			Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,399	0,390

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Dalam rangka mencapai arah kebijakan dari urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka dilaksanakan program Kegiatan berikut :

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.
3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan

sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

4. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK
5. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja
6. Peningkatan Pembangunan Keluarga

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara Umum Tujuan Rencana Kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas.

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ;
3. Meningkatkan Implementasi Pemenuhan Hak Anak;
4. Meningkatkan pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
5. Meningkatkan Pembangunan Kualitas Keluarga Sejahtera

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi teknis dan koordinasi pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran Indikator Kinerja urusan;
2. Pencapaian Peningkatan Kualitas Layanan;
3. Pencapaian Pemanfaatan Data dan Informasi;
4. Pencapaian Prioritas Nasional melalui Kementerian/Lembaga;
5. Pencapaian Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara umum rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, sebanyak 10 program, 26 kegiatan dan 54 sub kegiatan pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi
2	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
3	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
4	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
4	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
6	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
7	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
8	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
7	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
9	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
8	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

10	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
9	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
12	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
13	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
14	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
11	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
15	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
12	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
16	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
17	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
18	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
14	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
19	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
20	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
21	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain
15	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
22	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
16	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
23	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
24	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan

25	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
26	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal
27	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
17	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
28	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
29	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
30	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
31	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
18	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
32	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
33	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
34	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
36	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
37	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
21	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
38	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
39	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah
40	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
43	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
44	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
45	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
47	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

50	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
51	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
25	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
52	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
53	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
26	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
54	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas P3AKB Sumatera Utara Tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka telah disusun program dan kegiatan DP3AKB Sumatera Utara untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. 1. T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp23.384.234.751				Rp23.618.077.099
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				Rp21.676.650.220				Rp21.893.416.722
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Rp18.592.176.718				Rp18.778.098.485
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp4.070.000				Rp4.110.700
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumut	8 dokumen	Rp4.070.000			8 dokumen	Rp4.110.700
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp14.491.347.610				Rp14.636.261.086
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	Rp14.245.695.610			14 Bulan	Rp14.388.152.566

2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	Rp245.652.000			12 dokumen	Rp248.108.520
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp9.075.000				Rp9.165.750
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Rp -				
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 orang	Rp9.075.000			7 orang	Rp9.165.750
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp1.256.303.116				Rp1.268.866.147
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 paket	Rp16.893.030			2 paket	Rp17.061.960
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	Rp627.428.129			6 paket	Rp633.702.410
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	Rp157.018.778			4 paket	Rp158.588.966
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	Rp24.805.979			4 paket	Rp25.054.039
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 dok	Rp6.868.400			24 dok	Rp6.937.084

2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35 laporan	Rp423.288.800			35 laporan	Rp427.521.688
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp2.179.301.927				Rp2.201.094.946
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 laporan	Rp6.033.500			2 laporan	Rp6.093.835
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	Rp583.583.480			12 laporan	Rp589.419.315
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka		13 laporan	Rp1.589.684.947			13 laporan	Rp1.605.581.796
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp652.079.065				Rp658.599.856
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		32 unit	Rp398.738.065			32 unit	Rp402.725.446
2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 paket	Rp219.263.000			1 paket	Rp221.455.630

2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 paket	Rp34.078.000			3 paket	Rp34.418.780
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Rp614.221.615				Rp620.363.831
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				Rp79.690.600				Rp80.487.506
2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi		20 dokumen	Rp25.335.200			20 dokumen	Rp25.588.552
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		25 lembaga	Rp54.355.400			30 lembaga	Rp54.898.954
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				Rp38.970.800				Rp39.360.508

2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan		75 orang	Rp38.970.800			80 orang	Rp39.360.508
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				Rp495.560.215				Rp500.515.817
2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek		60 orang	Rp495.560.215			65 orang	Rp500.515.817
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Rp334.893.272				Rp338.242.205
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp55.929.500				Rp56.488.795
2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota		5 kegiatan	Rp55.929.500			5 kegiatan	Rp56.488.795

2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp179.446.757				Rp181.241.225
2.08.03.1.02.0009	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		254 orang	Rp179.446.757			254 orang	Rp181.241.225
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				Rp99.517.015				Rp100.512.185
2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek		30 orang	Rp22.519.750			30 orang	Rp22.744.948
2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		1 dokumen	Rp76.997.265			1 dokumen	Rp77.767.238
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN				Rp1.146.340.800				Rp1.157.804.208

	KUALITAS KELUARGA								
2.08.04.1.02	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				Rp1.146.340.800				Rp1.157.804.208
2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi		9 lembaga	Rp1.146.340.800			11 lembaga	Rp1.157.804.208
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Rp38.288.800				Rp38.671.688
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				Rp38.288.800				Rp38.671.688
2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		2 dokumen	Rp38.288.800			2 dokumen	Rp38.671.688
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Rp476.343.340				Rp481.106.773
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia				Rp46.243.780				Rp46.706.218

	Usaha Kewenangan Provinsi								
2.08.06.1.01.0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		2 laporan	Rp46.243.780			2 laporan	Rp46.706.218
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				Rp430.099.560				Rp434.400.556
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		1 kegiatan	Rp28.857.235			1 kegiatan	Rp29.145.807
2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi		2 dokumen	Rp302.626.500			2 dokumen	Rp305.652.765
2.08.06.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek		60 orang	Rp98.615.825			60 orang	Rp99.601.983
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Rp474.385.675				Rp479.129.532

2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp55.687.940				Rp56.244.819
2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota		20 lembaga	Rp55.687.940			20 lembaga	Rp56.244.819
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp44.798.681				Rp45.246.668
2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		90 orang	Rp44.798.681			90 orang	Rp45.246.668
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp373.899.054				Rp377.638.045

2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		16 kegiatan	Rp320.499.554			16 kegiatan	Rp323.704.550
2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		30 orang	Rp53.399.500			30 orang	Rp53.933.495
2.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp1.093.721.698				Rp1.104.658.915
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Rp417.341.100				Rp421.514.511
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				Rp345.841.100				Rp349.299.511

2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat		5 dokumen	Rp135.675.100			5 dokumen	Rp137.031.851
2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi		3 dokumen	Rp148.500.000			3 dokumen	Rp149.985.000
2.14.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain		3 dokumen	Rp61.666.000			3 dokumen	Rp62.282.660
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi				Rp71.500.000				Rp72.215.000
2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		1 dokumen	Rp71.500.000			1 dokumen	Rp72.215.000

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Rp366.145.868				Rp369.807.327
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Rp366.145.868				Rp369.807.327
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		3 dokumen	Rp77.000.000			5 Dokumen	Rp77.770.000
2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan		2 dokumen	Rp69.145.877			3 Dok	Rp69.837.336
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		3 Dok	Rp219.999.991			5 Dok	Rp222.199.991
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN				Rp310.234.730				Rp313.337.077

	KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp144.788.655				Rp146.236.542
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		2 kelompok	Rp93.499.285			3 kelompok	Rp94.434.278
2.14.04.1.01.0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		2 dokumen	Rp51.289.370			3 dokumen	Rp51.802.264
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp165.446.075				Rp167.100.536
2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota		2 dok	Rp36.185.270			3 dok	Rp36.547.123

2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		12 organisasi	Rp60.499.945			15 organisasi	Rp61.104.944
2.14.04.1.02.0010	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)		2 dok	Rp68.760.860			3 dok	Rp69.448.469
2.08	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				Rp613.862.833				Rp620.001.461
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Rp490.207.688				Rp495.109.765
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp490.207.688				Rp495.109.765

2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		70 orang	Rp129.368.580			70 orang	Rp130.662.266
2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100 orang	Rp360.839.108			100 orang	Rp364.447.499
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Rp123.655.145				Rp124.891.696
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp123.655.145				Rp124.891.696
2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		150 orang	Rp123.655.145			150 orang	Rp124.891.696

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini mempedomani Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan diharapkan menjadi perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan layanan dan kondisi lain yang tidak dapat diantisipasi seperti bencana.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen masyarakat, Akademisi, tenaga ahli, Lembaga Masyarakat yang fokus dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara serta seluruh pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam penentuan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Medan,

2025



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DWI ENDAH PURWANTI, S.S., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV-c
NIP. 197301231998032002